

LAPORAN TAHUNAN 2019

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 248 bahwa Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Peraturan di bidang keuangan, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang AnggaranPendapatan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun secara garis besar kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan di Pengadilan Tinggi Bandung meliputi kegiatan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Tinggi Bandung telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yakni :

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.097500/2019	5 Desember 2018	30.663.444.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099067/2019	5 Desember 2018	412.800.000

Selama Tahun Anggaran 2019 terdapat 10 kali Revisi DIPA BUA dan 4 kali Revisi DIPA BADILUM sebagai berikut :

No.	DIPA BUA (01)		
	5 Desember 2018	30.663.444.000	DIPA Awal
	26 Desember 2019	37.184.858.000	DIPA Akhir (Setelah Pagu Minus)

No.	DIPA BADILUM (03)		
	5 Desember 2018	412.800.000	DIPA Awal
	10 Desember 2019	412.800.000	DIPA Akhir

1. DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA)

DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Berikut ini pengertian dari 3 (tiga) jenis belanja tersebut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, yakni:

a. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan pensiunan serta Pegawai Honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Antara lain meliputi gaji dan tunjangan, uang makan, uang kehormatan Hakim Adhoc Tipikor.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan.

Antara lain meliputi belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan / atau menambah nilai asset tetap / asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Antara lain meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal lainnya.

1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung (Revisi ke-10) adalah sebesar **Rp.37.184.858.000,-** (*Tiga puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	:	Rp.	33.850.711.000,-	(91.03 %)
2. Belanja Barang	:	Rp.	3.154.647.000,-	(8.49 %)
3. Belanja Modal	:	Rp.	179.500.000,-	(0.48 %)

GRAFIK
PAGU DIPA BUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
BERDASARKAN JENIS BELANJA



Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung setelah revisi 10 Pagu Minus adalah sebesar **Rp36.965.299.262,-** (*Tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*) atau **99,41%**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	:	Rp.	33.850.709.275,-	(91.57 %)
2. Belanja Barang	:	Rp.	2.941.718.987,-	(7.96 %)
3. Belanja Modal	:	Rp.	172.871.000,-	(0.47 %)

GRAFIK
REALISASI ANGGARAN DIPA BUA PENGADILAN TINGGI
BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
BERDASARKAN JENIS BELANJA



2. DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM)

2.1 DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar **Rp. 412.800.000,-** (*Empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*). DIPA Badilum 03 hasil revisi terakhir (revisi 4) tidak berubah nilainya hanya terdapat pergeseran anggaran saja.

2.2 Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar **Rp 406.507.730,-** (*Empat ratus enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) atau **98.48%**.

3. Jumlah SPM (Surat Perintah Membayar)

Jumlah SPM yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Bandung selama Tahun 2019 adalah **241 SPM** terdiri dari **211 SPM DIPA 01 (097500)** dan **30 SPM DIPA 03 (099067)**.

4. Pengelolaan Perbendaharaan

- 1. LPJ Bendahara DIPA BUA tiap bulan.**
- 2. LPJ Bendahara DIPA BADILUM tiap bulan.**
- 3. GUP DIPA BUA (01) sebanyak 9 kali.**
- 4. GUP DIPA BADILUM (03) sebanyak 12 kali.**

TABEL REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN**DIPA BUA 01 DAN DIPA BADILUM 03****TAHUN ANGGARAN 2019***(Dalam Rupiah)*

NO	NAMA SATKER	REALISASI	REALISASI
		DIPA BUA 01	DIPA BADILUM 03
1	PT BANDUNG	99,41%	98,48 %
2	PN BANDUNG	99,20%	99,59%
3	PN BEKASI	98,93 %	95,81 %
4	PN BALE BANDUNG	98,79 %	98,37 %
5	PN CIBINONG	99,02 %	99,41 %
6	PN TASIKMALAYA	93,11 %	99,61 %
7	PN KARAWANG	96,54 %	97,74 %
8	PN BOGOR	98,55 %	92,88 %
9	PN DEPOK	99,44 %	98,19 %
10	PN CIREBON	99,61 %	94,79 %
11	PN GARUT	99,03 %	98,85 %
12	PN SUMBER	98,96 %	99,32 %
13	PN PURWAKARTA	98,86 %	96,73 %
14	PN SUBANG	99,20 %	99,86 %
15	PN INDRAMAYU	96,90 %	99,95 %
16	PN CIAMIS	96,50 %	96,69 %
17	PN SUKABUMI	97,22 %	99,82 %
18	PN CIBADAK	96,60 %	90,50 %
19	PN CIANJUR	99,67 %	99,08 %
20	PN SUMEDANG	98,87 %	96,57 %
21	PN MAJALENGKA	99,01 %	97,94 %
22	PN KUNINGAN	93,76 %	99,55 %
23	PN CIKARANG	97,35 %	99,65 %
24	PN BANJAR	98,24 %	90,78 %

B. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Menginput Dokumen Belanja Barang di Aplikasi BMN DIPA BUA (01)	10Dokumen	
2.	Menginput Dokumen Belanja Modal di Aplikasi Persediaan DIPA BUA (01)	2Dokumen	
3.	Menginput Dokumen Belanja Modal di Aplikasi Persediaan DIPA BADILUM (03)	6Dokumen	
4.	Membuat Berita Acara Stock Opname Semesteran DIPA BUA (01)	2 BeritaAcara	
5.	Membuat Berita Acara Stock Opname Semesteran DIPA BADILUM (03)	2 BeritaAcara	
6.	Mengelola Penghapusan BMN Pengadilan Tinggi Jawa Barat	2Laporan	
7.	Mengelola Penghapusan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	23Laporan	
8.	Mengelola Penetapan Status BMN Pengadilan Tinggi Jawa Barat	21 Laporan	
9.	Mengelola Penetapan Status BMN Satker Wilayah Jawa Barat	21Laporan	
10.	Mengelola Pemanfaatan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	14Laporan	
11.	Mengelola Usulan Hibah BMN (Berupa Uang dan Barang)	2Laporan	
12.	Mengelola Usulan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) BMN	-	
13	Mengelola Transfer MasukdanKeluar BMN	5Laporan	
14	Menyusun Laporan Rekon Internal DIPA BUA (01)	12 Laporan	
15	Menyusun Laporan Rekon Semesteran Internal DIPA BUA (01)	2 Laporan	
16	Menyusun Laporan Rekon Internal DIPA BADILUM (03)	12 Data	
17	Menyusun Laporan Rekon Semester DIPA BADILUM (03)	2 Laporan	
18	Menyusun Laporan Rekon Semester Wilayah DIPA BADILUM (03)	2 Laporan	
19	Menginput Data Tanah&Revaluasi BMN	1Laporan	
20	Mengelola Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	1 Laporan	

C. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan Negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**.

Kelompok PNBP meliputi :

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Laporan Realisasi PNBP PengadilanTinggi Bandung

Tahun Anggaran2019

(Dalam Rupiah)

BULAN	BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)	BADILUM (03)
Januari	3.898.688	355.000
Februari	4.017.354	1.085.000
Maret	3.753.539	805.000
April	4.017.354	1.020.000
Mei	4.017.354	9.120.000
Juni	4.017.354	290.000
Juli	4.017.354	910.000
Agustus	4.281.169	1.380.000
September	3.815.077	1.840.000
Oktober	3.551.262	1.030.000
November	6.359.420	520.000
Desember	8.559.420	3.450.000
TOTAL	54.305.345	21.805.000

D. TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

Untuk pertama kalinya Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) di lingkungan Mahkamah Agung RI diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang peradilan dan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja bagi pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu dilakukan penyesuaian Tunjangan Khusus Kinerja, sehingga dibuatlah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan peraturan yang terbaru adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

TABEL REKAPITULASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
(Dalam Rupiah)

NO	BULAN	JUMLAH NETTO	PPH	JUMLAH BRUTO
1	JANUARI	409.789.930	31.100.255	440.890.185
2	FEBRUARI	408.789.030	31.260.948	440.049.978
3	MARET	433.338.180	33.878.285	467.216.465
4	APRIL	412.861.340	31.326.597	444.187.937
5	MEI	411.797.710	32.665.380	444.463.090
6	THR	418.863.000	81.657.500	500.520.500
7	JUNI	404.195.670	32.123.063	436.318.733
8	TKK-13	412.621.000	73.032.348	485.653.348
9	JULI	394.478.170	30.745.748	425.223.918
10	AGUSTUS	393.983.500	30.245.482	424.228.982
11	SEPTEMBER	430.840.010	34.525.772	465.365.782
12	OKTOBER	424.083.730	34.381.605	458.465.335
13	NOVEMBER	415.446.590	33.701.595	449.148.185
14	DESEMBER	414.698.520	32.119.406	446.817.926
TOTAL		5.785.786.380	542.763.984	6.328.550.364

TABEL REKAPITULASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SATKER	JUMLAH NETTO	PPH	JUMLAH BRUTO
1	PT BANDUNG	5.785.786.380	542.763.984	6.328.550.364
2	PN BANDUNG	7.487.148.270	636.622.515	8.123.770.785
3	PN BEKASI	6.584.739.352	585.291.037	7.170.030.389
4	PN BALE BANDUNG	5.040.932.702	442.013.417	5.482.946.119
5	PN CIBINONG	4.452.326.028	379.547.268	4.831.873.296
6	PN TASIKMALAYA	2.505.033.880	220.138.374	2.725.172.254
7	PN KARAWANG	3.185.157.690	238.432.231	3.423.589.921
8	PN BOGOR	2.925.493.780	206.154.880	3.131.648.660
9	PN DEPOK	4.075.929.180	267.926.996	4.343.856.176
10	PN CIREBON	2.615.945.500	206.174.140	2.822.119.640
11	PN GARUT	2.032.642.440	138.709.325	2.171.351.765
12	PN SUMBER	2.312.563.190	186.998.894	2.499.562.084
13	PN PURWAKARTA	2.103.999.020	163.300.106	2.267.299.126
14	PN SUBANG	2.046.599.080	142.958.989	2.189.558.069
15	PN INDRAMAYU	2.420.267.170	173.502.703	2.593.769.873
16	PN CIAMIS	1.651.387.850	129.054.891	1.780.442.741
17	PN SUKABUMI	2.241.211.150	160.012.449	2.401.223.599
18	PN CIBADAK	1.820.686.880	145.283.426	1.965.970.306
19	PN CIANJUR	1.921.312.050	149.190.060	2.070.502.110
20	PN SUMEDANG	2.466.110.090	192.084.100	2.658.194.190
21	PN MAJALENGKA	1.814.483.710	129.033.919	1.943.517.629
22	PN KUNINGAN	1.958.695.090	129.625.983	2.088.321.073
JUMLAH		72.349.698.332	5.746.691.340	78.096.389.672

E. PENGELOLAAN PELAPORAN

1. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019.
3. Laporan E-Monev Bappenas tiap bulan
4. Laporan E-Monev SMART Kementerian Keuangan tiap bulan.
5. Laporan SIMAN, SIMANTAP dan SIPERMARI.
6. Laporan WASDAL.

F. PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Tahun 2019 : 410 surat

Surat Keluar Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Tahun 2019 : 189 surat

G. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diterima Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. TANGINAS AWARD
(Daftar Satuan Kerja Terbaik Dalam Penyampaian LPJ Secara Tepat Waktu dan Akurat Periode Bulan Januari 2019) sebagai Peringkat Terbaik II Kategori Pagu DIPA Kecil /099067 tanggal 1 Maret 2019.
2. TANGINAS AWARD
(Daftar Satuan Kerja Terbaik Dalam Penyampaian LPJ Secara Tepat Waktu dan Akurat Periode Bulan Mei 2019) sebagai Peringkat Terbaik III Kategori Pagu DIPA Sedang /097500 tanggal 24 Juni 2019.
3. PENGHARGAAN DARI DITJEN BADILUM
(Atas Prestasi Dalam Membina Satker Di Bawahnya Melaksanakan Pengelolaan Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2018 Dengan Penyerapan Di Atas 95%) tanggal 31 Juli 2019.

Demikian Laporan Kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019.